

**ANALISIS STATUS DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRIVATE
MILITARY COMPANY WAGNER GROUP DALAM PEMBERIAN JASA
KEAMANAN KEPADA PEMERINTAHAN REPUBLIK AFRIKA TENGAH
BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian
Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

MUHAMMAD NAUFAL YASYKUR

02011382126510

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Naufal Yasykur
NIM 02011382126510
Program Kekhususan : Hukum Internasional

JUDUL:

**ANALISIS STATUS DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRIVATE
MILITARY COMPANY WAGNER GROUP DALAM PEMBERIAN JASA
KEAMANAN KEPADA PEMERINTAHAN REPUBLIK AFRIKA TENGAH
BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Teelah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Juni
2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Palembang, 2025

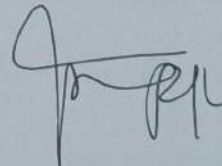
Mengesahkan

Pembimbing Utama



Dr. Akhmad Idris, SH., MH.
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu



Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M.
NIP. 199208152025062002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 198506162019031012

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Yasykur
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126510
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 21 Juni 2003 Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Penulis dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2025
yatakan

Muhammad Naufal Yasykur
NIM. 02011382126510

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

This is for everyone who i dearly beloved:

It ain't much but it's honest work.

“If you run you gain one, but if you move forward you gain two”

[Suletta Mercury from “The Witch From Mercury” S1 E1]

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **"Analisis Status Dan Pertanggungjawaban Hukum Private Military Company Wagner Group Dalam Pemberian Jasa Keamanan Kepada Pemerintahan Republik Afrika Tengah Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional"**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis banyak menemukan kesulitan, hambatan, bahkan tantangan selama proses penyusunan penelitian ini. Akan tetapi, dengan bantuan doa, bimbingan, nasihat, dukungan, dan semangat dari keluarga, teman-teman, serta para dosen penulis akhirnya dapat merampungkan penyusunan penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus bidang Hukum Internasional. Penulis di satu sisi juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan yang harus diperbaiki pada penelitian ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya kritik serta saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun agar mengetahui kekurangan dari penelitian yang telah ditulis ini.

Palembang, 2025
Yang menyatakan



Muhammad Naufal Yasykur NIM.
02011382126510

ABSTRAK

Private Military Company (PMC) merupakan sebuah perusahaan komersial yang menyediakan jasa logistik, pelatihan militer, pertahanan, serta jasa keamanan. Jasa PMC umumnya digunakan sebagai pendukung bagi operasi resmi suatu angkatan bersenjata. Penggunaan PMC atau perusahaan militer swasta, semakin meningkat, terutama dalam konteks konflik bersenjata dan operasi keamanan di negara-negara yang status politiknya tidak stabil. Wagner Group adalah sebuah perusahaan militer swasta dari Rusia yang beroperasi dan terlibat dalam berbagai operasi militer di berbagai negara. Wagner Group juga memberikan layanan jasanya di Republik Afrika Tengah. Namun, kehadiran Wagner Group di Republik Afrika Tengah telah mengundang sejumlah kontroversi seputar legalitas serta dampak kemanusiaan yang dihasilkan. Pada saat bersamaan, adanya berbagai laporan tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter oleh Wagner Group di Republik Afrika Tengah semakin memperburuk situasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis status hukum PMC Wagner Group dalam melakukan pemberian jasa keamanan kepada Republik Afrika Tengah, mengidentifikasi pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan Wagner Group pada saat melakukan operasi militer di republik afrika tengah, dan mengidentifikasi pertanggungjawaban hukum dan upaya pencegahan yang Wagner Group harus lakukan terkait dilakukannya pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Hasil dari penelitian ini adalah; Wagner Group tidak dapat dikualifikasikan sebagai kombatan dan tawanan perang, hal ini berarti Wagner Group merupakan pelaku kejahatan perang yang dapat dihukum sesuai dengan hukum nasional negara yang menangkapnya.

Kata kunci: Wagner Group, Private Military Company, Hukum Humaniter Internasional.

Palembang,

2025

Pembimbing Utama



Dr. Akhmad Idris, SH., MH

NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu



Rizka Nurliyantika, SH., LL.M

NIP. 199208152025062002

**Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

ANALYSIS OF THE STATUS AND LEGAL RESPONSIBILITY OF THE WAGNER GROUP PRIVATE MILITARY COMPANY IN PROVIDING SECURITY SERVICES TO THE GOVERNMENT OF THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC BASED ON INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

ABSTRACT

Private Military Company (PMC) is a commercial company that provides logistics, military training, defense, and security services. PMC services are generally used to support the operations of an armed force. The use of PMCs or private military companies is increasing, especially in the context of armed conflicts and security operations in countries with unstable political statuses. Wagner Group is a private military company from Russia that operates and is involved in various military operations in different countries. Wagner Group also provides its services in the Central African Republic. However, the presence of Wagner Group in the Central African Republic has sparked a number of controversies regarding the legality and humanitarian impact it produces. At the same time, various reports of alleged human rights violations and humanitarian law breaches by Wagner Group in the Central African Republic further exacerbate the situation. The purpose of this study is to analyze the legal status of the Wagner PMC Group in providing security services to the Central African Republic, to identify violations of International Humanitarian Law committed by the Wagner Group during military operations in the Central African Republic, and to identify the legal responsibilities and preventive measures that the Wagner Group must take concerning the violations of International Humanitarian Law. The results of this study indicate that the Wagner Group cannot be classified as combatants and prisoners of war, which means that the Wagner Group is considered a perpetrator of war crimes that can be prosecuted under the national laws of the country that captures them.

Keywords: Wagner Group, Private Military Company, International Humanitarian Law.

Main Supervisor



Dr. Akhmad Idris, SH, MH
NIP.197402012003121001

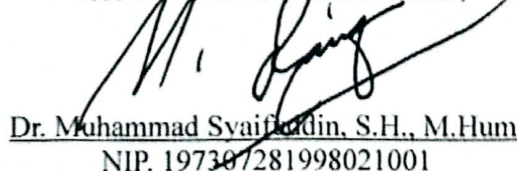
Palembang, 2025

Assistant Supervisor



Rizka Nurliyantika, SH, LL.M
NIP.199208152025062002

Acknowledged by,
Vice Dean for Academic Affairs,



Dr. Muhammad Syaifuldin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya



Dr. Drs. Djunaedi, M.SLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antarnegara yang melintasi batas-batas negara. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Internasional mencakup seluruh kaidah dan prinsip yang mengatur hubungan atau isu-isu yang melampaui batas negara, yang tidak bersifat perdata.¹ Saat ini, istilah yang sering digunakan untuk menyebut Hukum Internasional adalah *international law* atau Hukum Internasional Publik (*public international law*), yang menjadi istilah yang lebih populer. Hukum Internasional tidak hanya berfokus pada hubungan antarnegara, tetapi juga mencakup Hukum Humaniter Internasional (HHI). Sebagai bagian dari Hukum Internasional, HHI berfungsi sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk negara damai atau netral, untuk berperan dalam mengurangi penderitaan yang dialami masyarakat sipil maupun anggota militer akibat konflik bersenjata di berbagai negara. Istilah lengkap untuk Hukum Humaniter Internasional, sebagaimana disebutkan dalam Protokol Tambahan I 1977, adalah *International Humanitarian Law Applicable In Armed Conflict*.

Hukum Humaniter Internasional sebagai salah satu cabang dari Hukum Internasional Publik, pertama kali dirumuskan pada tahun 1864 melalui Konvensi Jenewa 1864 mengenai perlakuan terhadap angkatan bersenjata yang terluka dan

¹ Mahendra Putra Kurnia, "Hukum Internasional (Kajian Ontologis)", Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul 2008, hlm 80.

sakit di medan perang. Konvensi Jenewa 1949 kemudian telah mengalami modifikasi melalui tiga protokol amandemen yaitu; Protokol I (1977), mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, Protokol II (1977), mengenai Perlindungan Konflik Bersenjata Non Internasional Protokol III (2005), mengenai Adopsi Lambang Pembeda Tambahan.

Pada era modern seperti sekarang ini negara-negara di dunia tidak pernah lepas dengan konflik yang bersifat eksternal maupun internal, dan adapun jenis konfliknya yang beragam seperti politik, militer, sosial, budaya, ideologi, konflik antar negara, dan lain-lain. Hal ini membuat tidak semua negara dapat menangani konflik-konflik yang ada dengan kekuatan sendiri, sebuah negara dapat meminta atau mendapatkan pertolongan dari negara lain dengan cara kerjasama dalam suatu bidang yang telah disepakati. Akan tetapi, suatu negara tidak harus bekerja sama dengan negara lain untuk meminta pertolongan, negara tersebut dapat memakai jasa PMC. Jasa yang diberikan oleh PMC tidak hanya dapat digunakan oleh negara saja, akan tetapi dapat juga dipakai oleh entitas perorangan dan perusahaan.

PMC adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang layanan militer, yang awalnya berfokus pada konsultasi militer dan penyediaan suku cadang persenjataan. Tugas perusahaan ini berbeda-beda sesuai dengan permintaan dari pihak yang menyewa jasa PMC tersebut. Secara umum, layanan yang sering diminta mencakup peran sebagai tentara bayaran, pemberian pengawalan kepada tokoh-tokoh yang dianggap penting didalam suatu negara, penyedia logistik militer, penasihat militer, pengawalan dan perlindungan sumber daya penting di daerah

konflik, serta pelatihan militer yang akan diberikan.² PMC sering kali bekerja di luar negeri, di wilayah yang dilanda perang atau kerusuhan, dan bertindak atas nama pemerintah, perusahaan multinasional, atau organisasi non-pemerintah yang membutuhkan layanan keamanan. Dengan meningkatnya ketidakstabilan di beberapa wilayah dunia, peran PMC menjadi semakin penting sebagai alternatif bagi negara-negara atau entitas yang membutuhkan kemampuan militer tanpa harus mengerahkan angkatan bersenjata resmi.

Personel PMC biasanya terdiri dari individu yang masih dianggap memenuhi syarat untuk bertugas dalam militer dan memiliki keahlian khusus dalam bidang ketentaraan, seperti mantan anggota pasukan khusus yang sering dicari karena keterampilan dan pengalaman yang telah dimiliki, dalam unit-unit tempur kecil yang mandiri. Para personel PMC bisa juga didorong oleh hasrat atau semangat militer yang masih ada, atau oleh tawaran imbalan finansial yang lebih tinggi dibandingkan dengan gaji saat para personel PMC tersebut masih ber dinas di militer. Kadang-kadang, kemampuan personel PMC melebihi tentara reguler atau anggota pasukan khusus lainnya, dan dengan perlengkapan serta senjata yang lebih canggih, personel PMC sering kali mampu menembus garis depan pertempuran dan menyelesaikan misi dengan sukses.

Keterlibatan PMC dalam konflik bersenjata sering kali menimbulkan ketidakjelasan peran dan statusnya di dalam Hukum Humaniter Internasional. Penggunaan *Private Military Companies* atau perusahaan militer swasta, semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir di semua belahan dunia, terutama dalam konteks konflik bersenjata dan operasi keamanan di negara-negara yang status

² Jeremy Scahill, *The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army*, Terjemahan oleh Aang Muljanto dan Winny Prasetyowati, 2010, hlm 73.

politiknya tidak stabil. Salah satu PMC yang dikenal adalah Wagner Group, PMC ini adalah sebuah perusahaan militer swasta dari Rusia yang beroperasi dan terlibat dalam berbagai operasi militer di negara-negara yang memakai jasa Wagner Group, Sebagai PMC, Wagner Group menawarkan berbagai layanan: perlindungan dekat untuk tokoh-tokoh publik, pelatihan militer, dan konsultasi mengenai masalah keamanan. Namun, banyak laporan dan bukti menunjukkan bahwa PMC ini jauh melebihi aktivitas-aktivitas tersebut. Yang paling menonjol, Wagner Group aktif dalam konflik bersenjata di Afrika dan Timur Tengah. Lebih dari 3000 tentara bayaran telah dikerahkan di Suriah,³ 2500 di Ukraina,⁴ dan sekitar 1000 di Libya⁵ serta Republik Afrika Tengah. Wagner Group beroperasi baik bersama tentara Rusia maupun secara mandiri.

Wagner awalnya didirikan sebagai perusahaan militer swasta oleh Yevgeny Prigozhin pada tahun 2014, seorang oligarki yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam perkembangannya, Wagner Group berubah menjadi konglomerat yang tidak hanya mencakup PMC saja, tetapi juga sejumlah perusahaan yang terkait dengan operasi Wagner Group di Timur Tengah dan Afrika. Prigozhin mengelola jaringan internasional yang luas ini dan memberikan sumber keuangan untuk disalurkan ke negara Rusia. Awalnya, Wagner hanya terdiri dari sekitar lima ribu kontraktor, tetapi jumlah tersebut telah meningkat menjadi lebih dari 50 ribu anggota, terutama karena perekrutan

³ Anna Nemtsova, "A Russian Blackwater? Putin's Secret Soldiers in Ukraine and Syria", <https://www.thedailybeast.com/a-russian-blackwater-putins-secret-soldiers-in-ukraine-and-syria> (diakses pada 8 september 2024).

⁴ Jonathan Beale, "Russia-supporting Wagner Group mercenary numbers soar", <https://www.bbc.com/news/world-europe-64050719> (diakses pada 8 september 2024).

⁵ Samer Al-Atrush dan Nick Wadhams, "U.S. Warns Against Russia's Growing Role in Libya War". <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-15/u-s-warns-against-growing-russian-role-in-libya-s-war> (diakses pada 8 september 2024).

perekrutan yang terdiri dari narapidana dari penjara-penjara Rusia.⁶ Wagner Group terlibat dalam invasi Rusia ke Ukraina timur hingga tahun 2015, termasuk melakukan dugaan pembunuhan terhadap pemimpin pemberontak lokal. Selama waktu itu dan hingga tahun 2016, Wagner Group terlibat dalam mendukung aktivitas bersenjata Rusia di Suriah. Mulai dari tahun 2010, Wagner Group mendirikan operasi di beberapa negara Afrika, menyediakan layanan keamanan dan, dalam beberapa kasus, terlibat dalam kegiatan pertambangan dan sektor swasta lainnya. Negara-negara tersebut meliputi Republik Afrika Tengah, Libya, Mozambik, Mali, dan Sudan.⁷ Wagner Group bekerja sama dengan rezim lokal yang otoriter untuk memberikan dukungan militer dan menjaga stabilitas pemerintah yang berkuasa. Dalam beberapa kasus, kehadirannya membantu mempertahankan kendali terhadap sumber daya alam yang berharga, seperti tambang emas dan berlian, yang menjadi imbalan atas layanan keamanan.

Wagner Group adalah suatu contoh kemitraan publik-swasta di Rusia, yang dicontohkan dengan pemberian sebagian kewenangan pemerintah kepada sebuah entitas swasta. Meskipun secara hukum PMC masih ilegal di Rusia, pemerintah memberikan akses dan perlindungan khusus yang tidak dimiliki oleh bisnis atau individu lainnya. Pemerintah Rusia memberikan kewenangan kepada entitas swasta ini dengan syarat PMC tersebut bertindak sesuai perintah dan kepentingan pemerintah. Departemen Keuangan AS menganggap Wagner Group sebagai kekuatan proksi yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan Rusia, meskipun dikelola oleh seorang warga sipil. Wagner Group sebagai entitas swasta bisa

⁶ Jason Blazakis, Colin P. Clarke, Naureen Chowdhury Fink, Sean Steinberg, "Special Report Wagner Group: The Evolution of a Private Army" Juni 2023.

⁷ Congressional Research Service, "Russia's Wagner Private Military Company (PMC)" <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12344> 1 Agustus 2023 (diakses pada 8 september 2024).

mengejar kepentingan pribadi atau komersial, namun tetap harus tunduk pada aturan pemerintah dan berada di bawah kendali negara Rusia⁸ disebabkan Wagner Group merupakan sebuah entitas swasta.

Wagner Group telah menarik banyak perhatian internasional. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh keterlibatan personelnnya yang semakin meningkat di Afrika, dimana anggota grup tersebut semakin banyak dikerahkan. Saat ini, Wagner Group memiliki operasi di seluruh benua, dengan jumlah personil terbanyak dikerahkan di Republik Afrika Tengah, Sudan, Libya, dan Mali (dengan rumor pengerahan hingga 1.000 anggota Wagner Group). Negara lainnya yang dituju telah terlihat, yaitu: di Mozambik, Guinea Bissau, dan Madagaskar.⁹ Keberadaan Wagner Group di negara-negara ini tidak hanya mencerminkan ekspansi pengaruh militer dan politik Rusia di kawasan tersebut, tetapi juga mengindikasikan peran Wagner Group sebagai alat diplomasi tidak resmi Kremlin. Aktivitas Wagner Group mencakup pelatihan militer bagi pasukan lokal, perlindungan terhadap pejabat pemerintahan, hingga keterlibatan dalam eksploitasi sumber daya alam seperti emas dan berlian.¹⁰ Selain itu, laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan media internasional menyoroti dugaan pelanggaran HAM serius yang dilakukan oleh Wagner Group di sejumlah wilayah operasinya.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Wagner Group dipandang sebagai elemen yang semakin penting dalam strategi Rusia untuk mendapatkan pengaruh

⁸ Congressional Research Service, "Russia's Wagner Private Military Company (PMC)"

<https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12344> 1 Agustus 2023 (diakses pada 8 september 2024)

⁹ Karen Philippa Larsen, PhD dan Flemming Splidsboel Hansen, "Russia's comprehensive approach and the increased use of the Wagner Group challenges the West in Africa" 22 februari 2022.

¹⁰*Ibid.*

yang lebih besar di Afrika. Wagner Group telah dikaitkan dengan banyak pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang, termasuk di Ukraina dan Negara Republik Afrika Tengah di mana Wagner Group beroperasi. Beberapa operasinya tampak memiliki hubungan jelas dengan tujuan kebijakan luar negeri Rusia, sementara yang lain tampaknya lebih bersifat komersial¹¹, yang berfokus untuk mengambil keuntungan.

Republik Afrika Tengah merupakan negara yang telah lama dilanda konflik dan ketidakstabilan politik. Sejak kemerdekaan pada tahun 1960, Republik Afrika Tengah telah mengalami konflik termasuk enam kudeta. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mencapai perdamaian dan perlucutan senjata, sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh pasukan Seleka—koalisi kelompok bersenjata yang mayoritas beragama Islam—merebut ibu kota Bangui dan menggulingkan pemerintahan François Bozizé pada tahun 2013.¹² Sebagai tanggapan atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Seleka, koalisi pejuang Kristen yang dikenal sebagai *anti-balaka* terbentuk untuk meluncurkan serangan kekerasan terhadap pasukan Seleka dan warga sipil Muslim, memicu konflik baru yang telah menewaskan dan memaksa ribuan orang mengungsi.

Telah dilakukan tujuh kali perjanjian damai antara pemerintah dan kelompok bersenjata non-negara sejak tahun 2012,¹³ milisi Seleka dan anti-balaka justru semakin meningkatkan aktivitas dan pengaruh di seluruh negeri, meneror warga sipil dan saling bentrok untuk memperebutkan kendali atas sumber daya

¹¹ Karen Philippa Larsen, PhD dan Flemming Splidsboel Hansen, “Russia’s comprehensive approach and the increased use of the Wagner Group challenges the West in Africa” 22 februari 2022.

¹² Center for Preventive Action, “Conflict in the Central African Republic” , *Global Conflict Tracker*, <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violence-central-african-republic>, (diakses pada 10 April 2025)

¹³ *Ibid.*

mineral dan jalur migrasi. Karena besarnya skala krisis, Dewan Keamanan PBB membentuk pasukan penjaga perdamaian pada April 2014 yang menggabungkan pasukan Uni Afrika dan Prancis yang sebelumnya telah dikerahkan ke Republik Afrika Tengah. Sementara itu, krisis kemanusiaan di Republik Afrika Tengah terus memburuk, dengan sekitar 70 persen penduduk hidup dalam kemiskinan ekstrem dan sekitar 3,4 juta orang membutuhkan bantuan.¹⁴ Untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas, pemerintahan Republik Afrika Tengah mengandalkan dukungan pihak eksternal, termasuk Wagner Group. Namun, kehadiran Warner Group di Republik Afrika Tengah telah menimbulkan banyak kontroversi mengenai legalitas dan legitimasi kegiatannya serta dampak yang ditimbulkannya,¹⁵ dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Wagner Group.

Pada Maret 2018, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan pengiriman lima tentara dan sekitar 170 instruktur sipil ke Republik Afrika Tengah untuk melatih pasukan bersenjata negara tersebut. Meskipun secara resmi disebut sebagai instruktur sipil, laporan dari berbagai sumber mengonfirmasi bahwa pasukan tersebut adalah anggota Wagner Group, sebuah perusahaan militer swasta yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah Rusia. Sejak kedatangan pasukan tersebut, Wagner Group telah memperluas peranannya di Republik Afrika Tengah. Selain memberikan pelatihan militer, Wagner Group juga terlibat dalam operasi tempur langsung, pengamanan fasilitas pemerintah, dan perlindungan pribadi bagi Presiden Faustin-Archange Touadéra. Pada Mei 2018, jumlah personel Wagner di

¹⁴ Center for Preventive Action, "Conflict in the Central African Republic", *Global Conflict Tracker*, <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violence-central-african-republic>, (diakses pada 10 April 2025)

¹⁵ Alexis Arieff, Christopher M. Blanchard, Lauren Ploch Blanchard, Andrew S. Bowen, "Russia's Wagner Group in Africa: Issues for Congress" 3 Agustus 2023, hal 2.

Republik Afrika Tengah dilaporkan mencapai sekitar 1.400 orang.¹⁶ Kehadiran Wagner Group di Republik Afrika Tengah juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Mereka diketahui mengamankan dan mengelola tambang emas serta sumber daya alam lainnya di negara tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di komunitas internasional mengenai eksploitasi sumber daya dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

Pada Agustus 2018, Rusia dan Republik Afrika Tengah menandatangani perjanjian kerja sama militer yang semakin memperkuat kehadiran Wagner Group di negara tersebut. Meskipun pemerintah Rusia menyatakan bahwa para instruktur tersebut tidak terlibat dalam operasi militer, berbagai laporan menunjukkan bahwa Wagner Group Aktif dalam pertempuran dan operasi keamanan di lapangan.¹⁷ Keterlibatan Wagner Group di Republik Afrika Tengah mencerminkan strategi Rusia untuk memperluas pengaruhnya di Afrika melalui dukungan militer dan ekonomi, seringkali dengan mengorbankan stabilitas dan hak asasi manusia di negara-negara yang terlibat.¹⁸

Menurut presiden Republik Afrika Tengah, Faustin-Archange Touadéra, Wagner Group tersebut dikirimkan dan beroperasi di Republik Afrika Tengah untuk melatih pasukan militer dan membantu dalam mengamankan negaranya.¹⁹ Pelatihan yang diberikan akan memperkuat efektivitas angkatan bersenjata Republik Afrika Tengah dalam memerangi penjahar, dan jasa keamanan yang

¹⁶ Yati Maulana, Jaringan Operasi Tentara Bayaran Wagner, dari Eropa Hingga Afrika, https://www.katakini.com/artikel/88323/jaringan-operasi-tentara-bayaran-wagner-dari-eropa-hingga-afrika/?utm_source=chatgpt.com, (diakses pada 11 April 2025).

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Russian News Agency, "Russia provides free military aid to Central African Republic — Foreign Ministry" <https://tass.com/defense/995674> 23 Maret 2018, (diakses pada 9 september 2024).

¹⁹ Ellen Ioanes, "These are the countries where Russia's shadowy Wagner Group mercenaries operate". <https://www.businessinsider.com/russia-wagner-group-mercenaries-where-operate-2018-4> (diakses pada 9 september 2024).

dilakukan adalah melindungi lokasi pertambangan, mendukung pemerintah Republik Afrika Tengah, dan memberikan perlindungan bagi Presiden Faustin-Archange Touadéra dari pasukan pemberontak.²⁰ Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara militer Republik Afrika Tengah dan pasukan keamanan swasta yang dikelola oleh Wagner Group.

Peran Wagner Group juga untuk mengisi kekosongan keamanan yang ditinggalkan oleh Prancis setelah menarik pasukan militernya dari negara tersebut pada Oktober 2016. Republik Afrika Tengah sedang di dalam konflik bersenjata perang saudara sejak tahun 2012, yang membuat kebanyakan wilayah negaranya berada di bawah kendali pemberontak.²¹ Hal yang membuat kebijakan luar negeri Rusia dan aktivitas Wagner Group di Afrika menjadi sangat kontroversial adalah bahwa Wagner Group secara teratur muncul sebagai instrumen kebijakan luar negeri non-resmi, seringkali memfasilitasi dan mencari akses ke sumber daya alam di Republik Afrika Tengah. kegiatan yang paling kontroversial dari aktivitas Rusia di Republik Afrika Tengah terkait dengan banyak laporan dan kekhawatiran yang diungkapkan oleh organisasi internasional, dan para jurnalis mengenai aktivitas Warner Group yang berperan sebagai militer Rusia,²² hal ini menimbulkan keresahan dikarenakan Wagner group seharusnya tidak memiliki afiliasi dengan militer Rusia.

Warner Group diduga memiliki tujuan yang terselubung untuk melakukan operasi ini yaitu, ingin menguasai sumber daya dari negara tersebut. Pada bulan

²⁰ David Zygnier dan Neue Zürcher Zeitung, "How Russia is influencing crisis-stricken African countries". <https://www.inopressa.ru/article/28May2018/nzz/afrika.html> (diakses pada 9 september 2024).

²¹ Akram Kharief, "Foreign mercenaries in new scramble for Africa and the Sahel". <https://www.middleeasteye.net/news/foreign-mercenaries-new-scramble-africa-and-sahel> (diakses pada 9 september 2024).

²² Theo Neethling "Russian Para-Military Operations in Africa: The Wagner Group as a De Facto Foreign Policy Instrument" 2023, hlm 2.

April, warga lokal menghentikan sebuah pesawat Cessna yang terdaftar di Rusia agar tidak bisa lepas landas di Kaga-Bandoro, wilayah yang dikuasai oleh pemberontak dan berdekatan dengan tambang berlian. Menurut pemerintah Republik Afrika Tengah, pesawat tersebut mengangkut penasihat militer Rusia yang berada di sana untuk melakukan negosiasi damai dengan pemberontak.²³ Saksi mata melaporkan bahwa tiga atau empat tentara Rusia dari pesawat itu mengunjungi tempat tinggal para pemimpin pemberontak Muslim.²⁴ Kejadian ini menimbulkan kecurigaan dari *Center for Information and Technology* (CIT) dan *International non-governmental organization* (INGO) bahwa Wagner Group mungkin dapat terlibat juga dalam penjagaan tambang berlian di wilayah pemberontak. Beberapa tahun kemudian, laporan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Republik Afrika Tengah menyebutkan bahwa Wagner Group telah memperkuat dan memperbanyak kehadirannya di pusat-pusat pertambangan utama negara tersebut²⁵.

Selain itu, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Wagner Group kemungkinan besar telah mengambil peran yang lebih aktif dalam eksploitasi sumber daya alam di wilayah-wilayah tersebut, terutama di tambang berlian dan emas. Keberadaan yang semakin kuat di pusat-pusat ekonomi strategis menimbulkan kekhawatiran bahwa Wagner Group tidak hanya beroperasi sebagai penyedia jasa keamanan, tetapi juga sebagai aktor ekonomi yang mengeksploitasi kekayaan alam negara tersebut untuk keuntungan pribadi dan kepentingan Rusia.

²³ Alec Luhn, "Russian journalists killed in Central African Republic while investigating mercenaries of 'Putin's chef'" Agustus 2018, <https://ghostarchive.org/archive/E6vWZ> (diakses pada 9 september 2024)

²⁴ Andrew McGregor, "How Russia Is Displacing the French in the Struggle for Influence in the Central African Republic" 15 Mei 2018, <https://jamestown.org/program/how-russia-is-displacing-the-french-in-the-struggle-for-influence-in-the-central-african-republic> (diakses pada 11 september 2024)

²⁵ *Ibid.*

Penguasaan sumber daya alam menjadi dasar masuknya Warner Group ke Republik Afrika Tengah, dengan kontrak yang dipertukarkan untuk penguasaan tambang antara perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Wagner Group dan pemerintah Republik Afrika Tengah mulai muncul pada akhir 2017.²⁶ Perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Prigozhin (salah satu pemimpin dan orang yang sangat penting di Wagner Group), seperti Lobaye Invest, Midas Resources, dan Diamville, memperoleh kontrak untuk mengoperasikan lokasi tambang emas dan berlian di Republik Afrika Tengah, sementara Wagner Group menyediakan layanan keamanan bagi tambang dan pemimpin politik.²⁷ Selain tambang emas dan berlian, bukti juga menunjukkan adanya keterkaitan antara perusahaan kayu bernama Bois Rouge dengan Wagner Group²⁸. Wagner Group memperkuat kendali atas industri tambang berlian Swasta di Republik Afrika Tengah saat ini, sebagian besar kolektor didanai oleh Rusia, seorang penambang tidak dapat bekerja jika ia tidak bekerja dengan Wagner Group.²⁹ hal ini membuat persaingan di dalam industri tersebut tidak sehat dan dapat memicu kerugian pada individu di dalam industri tersebut.

Jangkauan pemerintahan Touadéra yang terbatas di daerah pedesaan dan serangan oleh pasukan bersenjata yang berafiliasi dengan *Coalition of Patriots for Change* (CPC) pada tahun 2020 membatasi akses ke lokasi penambangan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi melalui Bangui. Serangan terhadap para penambang meningkat pada tahun 2020 dan naik hampir tiga kali lipat pada tahun

²⁶ Carl Schreck, "What Are Russian Military Contractors Doing In The Central African Republic?" Radio Free Europe / Radio Liberty, 2 Agustus 2018.

²⁷ Anton Baev, Mikhail Maglov, "Contract from President: What the Company Linked to Prigozhin Won in the CAR" The Bell, 18 Agustus 2018.

²⁸ Sébastien Calvet, 'RCA: Les Diamants de Sang de Prigojine,' Desember 2022.

²⁹ *Ibid*

2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Lobaye, sebuah wilayah barat daya dengan banyak lokasi yang terkait dengan perusahaan Lobaye Invest dan Bois Rouge yang berhubungan dengan Wagner Group, menjadi area awal dimana Wagner Group berfokus untuk merebut kembali kendali dari milisi CPC. Wilayah yang di mana Wagner Group telah berkonsentrasi pada operasi militernya sejak Desember 2022, hal ini juga bertepatan dengan lokasi tambang strategis yang dikelola Rusia,³⁰ terutama di sekitar Bria. Kehadiran Wagner Group di Bria dan sekitarnya memberikan keuntungan strategis bagi Rusia dalam mengontrol sektor pertambangan, sekaligus memperkuat posisi ekonomi dan politik di Republik Afrika Tengah.

Wagner Group juga melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia pada saat melakukan operasi militernya di Republik Afrika Tengah. Ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa pemerintah atau agen-agennya terlibat dalam pembunuhan sewenang-wenang atau ilegal, termasuk pembunuhan tanpa proses hukum, sepanjang tahun tersebut. *Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique* (MINUSCA) melaporkan 33 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan keamanan negara, termasuk Angkatan Bersenjata Republik Afrika Tengah/*Forces armées centrafricaines* (FACA), serta personel keamanan lainnya yang diidentifikasi sebagai bagian dari elemen Wagner Group. Kasus pembunuhan ini banyak terjadi ketika pasukan keamanan dan elemen Wagner Group mencurigai warga sipil terlibat dengan kelompok bersenjata, atau karena warga sipil tersebut tinggal atau bekerja di dekat area penambangan, seperti insiden serangan terhadap penduduk Ndassima pada

³⁰ Philip Obaji Jr, "Wagner Group accused of killing 70 Civilians in Gold Mine Massacre" 31 Januari 2022.

tahun 2022,³¹ yang memakan korban dan menimbulkan kekhawatiran bagi penduduk kota Ndassima.

Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) mencatat dan melaporkan jumlah korban tewas terkait konflik mencapai angka tertinggi pada tahun 2022.³² Dalam sebuah insiden pada Januari 2022, tentara bayaran Wagner Group dilaporkan membunuh puluhan warga sipil di sekitar tambang emas dekat Bria. Kekerasan yang melibatkan Wagner Group juga banyak terjadi di sekitar lokasi tambang besar Ndassima,³³ dimana Lobaye Invest dari Rusia telah memperluas operasi pengambilan sumber daya.

Pada bulan Februari, MINUSCA melaporkan bahwa FACA dan Wagner Group mengeksekusi tiga pria secara ilegal di Sikikédé, prefektur Vakaga, karena berhubungan dengan kelompok bersenjata seperti *Union pour la Paix en Centrafrique* (UPC), *Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique* (FPRC), Misseriya Arab, dan Salamat. Tangan para korban diikat dengan tali dan kabel listrik. Pada bulan Maret, sembilan warga negara Tiongkok dieksekusi di dekat tambang emas di Chimbolo, prefektur Ouaka. Pemerintah membentuk komisi penyelidikan yang menyimpulkan bahwa CPC bertanggung jawab atas kematian tersebut, namun tidak mengidentifikasi tersangka atau melakukan penangkapan. MINUSCA juga melaporkan bahwa mantan militan UPC yang direkrut sebagai

³¹ United States Department of State: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor "Country Reports on Human Rights Practices for 2023" hlm 3.

³² Chief Bisong Etahoben, "CAR: Russian Mercenaries Assert Authority Over Bria, Say UN Forces Not In Charge" HumAngle, 19 Juli 2021.

³³ Erin Banco, "U.S. cable: Russian paramilitary group set to get cash infusion from expanded African mine", Politico, 19 Januari 2023.

proxy oleh Wagner Group terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di daerah Maloum.³⁴

Reaksi internasional terhadap situasi ini semakin meningkat, dengan beberapa negara dan organisasi hak asasi manusia melakukan investigasi lebih lanjut dan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan Wagner Group di Republik Afrika Tengah.

Sebuah investigasi yang dilakukan oleh organisasi *The Sentry* mengungkap bagaimana Wagner Group berhasil mendapatkan pengaruh besar atas kepemimpinan politik dan militer Republik Afrika Tengah, serta menguasai perekonomian negara tersebut. Tim investigasi mewawancarai lebih dari 45 orang, termasuk 11 anggota FACA, pasukan yang berpartisipasi dalam operasi militer pemerintah, korban, serta sumber yang memiliki informasi langsung mengenai militer. *The Sentry* juga menganalisis foto, citra satelit, video, dan dokumen terkait. Hasil investigasi menunjukkan bahwa Wagner Group dengan dukungan dari Presiden Faustin-Archange Touadéra, sengaja menebar teror dan ketakutan untuk menundukkan penduduk Republik Afrika Tengah di bawah kendali Wagner Group serta untuk memperkuat kepentingan finansial.

Pasukan Wagner Group yang terbatas tetapi didukung oleh angkatan bersenjata negara Republik Afrika Tengah, Touadéra dan sekutu terdekatnya berhasil mengambil alih institusi negara Republik Afrika Tengah dan memperkuat cengkraman kekuasaannya. serta dengan ini juga, para pejuang Wagner Group, tentara Afrika Tengah, dan proksinya serta pasukan yang dilatih dan diberi senjata

³⁴ United States Department of State: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor "Country Reports on Human Rights Practices for 2023" hlm 4.

juga ikut mendapatkan manfaat.³⁵ yaitu berupa pelatihan militer, wilayah dan uang. Para prajurit yang dilatih dan diberi senjata oleh Wagner Group mendapatkan posisi strategis dalam operasi militer dan keamanan, memperkuat dominasi di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam.

Wagner Group pasti akan terus mendukung upaya Rusia untuk memenangkan pengaruh di Afrika. Amerika Serikat dan negara-negara sekutu pasti sudah mengetahui tentang upaya Wagner Group yang berusaha merusak tatanan internasional berbasis aturan dan memanfaatkan kemunduran demokrasi serta ketidakstabilan/ketidakamanan negara tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyoroti kegagalan Wagner Group di tempat-tempat seperti Mozambik, melawan disinformasi Rusia di tempat-tempat seperti Mali, memberikan sanksi kepada negara-negara yang bermitra dengan Wagner Group, mempertahankan sanksi multilateral terhadap Rusia, melacak dan mempublikasikan pelanggaran hak asasi manusia oleh Wagner Group mengerahkan badan intelijen yang relevan seperti yang dilakukan Perancis di Mali, berinvestasi dalam pengembangan kapasitas pasukan keamanan untuk mengurangi daya tarik dari Wagner Group, mempertimbangkan opsi hukum untuk menuntut pasukan Wagner Group atas kekejaman yang dilakukan, serta memberikan dukungan untuk pemerintah di negara Republik Afrika Tengah.

Dari kasus diatas dapat diketahui bahwa Wagner Group di Republik Afrika Tengah tidak melakukan apa yang biasanya PMC lakukan di negara konflik lainnya, biasanya sebuah negara membutuhkan jasa PMC dikarenakan konflik peperangan dengan negara lain. Akan tetapi, Wagner Group juga melakukan

³⁵ The Sentry, "Architects of Terror", Juni 2023, hlm 6.

operasi ini dengan tujuan mengambil keuntungan baik untuk Wagner Group sendiri maupun untuk negara Rusia. Disisi lain, Wagner Group juga melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. dengan ini penulis ingin melakukan penelitian tentang apa status Warner Group sebagai PMC di Republik Afrika Tengah dan apa pertanggungjawaban yang harus dilakukan atas aktivitas yang Wagner Group lakukan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Status dan Pertanggungjawaban Hukum *Private Military Company* Wagner Group Dalam Pemberian Jasa Keamanan Kepada Pemerintahan Republik Afrika Tengah Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana status hukum Wagner Group sebagai PMC dalam pemberian jasa keamanan berdasarkan konteks Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan akuntabilitas hukum yang dapat diterapkan kepada Wagner Group atas tindakan yang diduga melanggar Hukum Humaniter Internasional selama melakukan operasi militer di Republik Afrika Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis status hukum PMC Wagner Group dalam melakukan pemberian jasa keamanan kepada republik afrika tengah.
2. Mengidentifikasi pertanggungjawaban hukum dan akuntabilitas hukum yang Wagner Group harus lakukan terkait dilakukannya pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah memperjelas status dan regulasi PMC seperti Wagner Group, terutama dalam konteks hukum humaniter internasional. Dengan menganalisis posisi hukum PMC dalam hubungan internasional dan konflik bersenjata, penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana hukum internasional saat ini mengatur entitas non-negara yang terlibat dalam operasi militer, sekaligus mendorong diskusi tentang perlunya pembaharuan atau pengembangan lebih lanjut dalam kerangka hukum yang ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, serta dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman khususnya kepada para mahasiswa yang juga melakukan penelitian tentang PMC terkhusus Wagner Group.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya batasan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah kajian tentang ilmu hukum internasional dan hukum humaniter, khususnya yang berkaitan dengan status hukum PMC, pertanggungjawaban hukum dan akuntabilitas hukum yang dapat dilakukan suatu PMC apabila PMC tersebut melanggar suatu peraturan internasional, serta Mencari sebuah solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintahan suatu negara dalam mengatasi tindakan dan pengaruh dari suatu PMC yang secara tidak langsung ingin menguasai dan mengambil sumber daya alam negara tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan

Menurut C.F. Strong, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi (superioritas) dalam suatu negara, yang mencakup kemampuan untuk membuat hukum.³⁶ Dengan demikian, kedaulatan merujuk pada konsep otoritas tertinggi dalam sebuah negara. Kedaulatan memiliki dua aspek: internal, yaitu kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara, dan eksternal, yaitu kemerdekaan penuh dari pengaruh negara lain.

³⁶ Annisa, "teori kedaulatan pengertian dan jenisnya", <https://fahum.umsu.ac.id/teori-kedaulatan-pengertian-dan-jenisnya> 26 Juni 2023 (diakses pada 11 september 2024).

Kedaulatan menyiratkan kekuasaan penuh dalam pengelolaan negara baik secara internal maupun eksternal.

Teori kedaulatan memiliki beberapa jenis, yaitu:

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori Kedaulatan Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, dan Tuhan memiliki kekuasaan tertinggi. Kekuasaan ini bisa diwakili oleh seorang penguasa yang dianggap sebagai wakil Tuhan atau melalui hukum Tuhan sebagai sumber hukum tertinggi, yang dikenal sebagai Nomokrasi³⁷. Teori ini dianut oleh raja-raja yang dianggap keturunan dewa, seperti raja-raja Mesir kuno, kaisar Jepang dan Cina, serta raja-raja Jawa pada masa Hindu.

b. Teori Kedaulatan Raja

Menurut teori ini, kekuasaan negara berada ditangan raja sebagai perwujudan kehendak Tuhan. Raja dianggap sebagai bayangan Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak dan tidak terbatas, berada di atas hukum. Rakyat harus menyerahkan hak dan kekuasaannya kepada raja, yang dipercaya bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pandangan ini muncul setelah sekularisasi di Eropa, dimana raja dianggap bijaksana dan suci, serta memiliki posisi yang tak tertandingi dalam negara.

c. Teori Kedaulatan Rakyat

³⁷ Annisa, "teori kedaulatan pengertian dan jenisnya", <https://fahum.umsu.ac.id/teori-kedaulatan-pengertian-dan-jenisnya> 26 Juni 2023 (diakses pada 11 september 2024).

Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat, karena rakyat adalah pemegang kedaulatan sejati. Doktrin ini berasal dari konsep Romawi *lex regia*, yang berarti kekuasaan berasal dari rakyat. Kedaulatan rakyat dapat dipahami melalui beberapa pandangan: sebagai seluruh rakyat di wilayah negara, bangsa, korporatis yang mencakup penguasa, melalui dewan pemilihan, atau diwakilkan dalam sebuah majelis yang mewakili rakyat³⁸ dan dapat diandalkan oleh rakyat.

d. Teori Kedaulatan Negara

Menurut teori ini, kekuasaan negara berada ditangan raja sebagai perwujudan kehendak Tuhan. Raja dianggap sebagai bayangan Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak dan tidak terbatas, berada di atas hukum. Rakyat harus menyerahkan hak dan kekuasaannya kepada raja, yang dipercaya bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pandangan ini muncul setelah perkembangan sekulerisasi di Eropa,³⁹ dimana raja dianggap bijaksana dan suci, serta memiliki posisi yang tak tertandingi dalam negara.

e. Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara ada pada hukum, bukan pada negara atau individu tertentu. Artinya, yang berdaulat adalah lembaga atau orang yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan yang mengikat seluruh warga negara⁴⁰. Di Indonesia, sistem yang dianut

³⁸ Annisa, “teori kedaulatan pengertian dan jenisnya” , <https://fahum.umsu.ac.id/teori-kedaulatan-pengertian-dan-jenisnya> 26 Juni 2023 (diakses pada 11 september 2024).

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Annisa, “teori kedaulatan pengertian dan jenisnya” , <https://fahum.umsu.ac.id/teori-kedaulatan-pengertian-dan-jenisnya> 26 Juni 2023 (diakses pada 11 september 2024).

adalah kedaulatan rakyat yang ditegaskan dengan kedaulatan hukum, di mana hukum menjadi landasan utama dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara.

2. Teori Keamanan Nasional

Dalam konteks hubungan internasional yang semakin berkembang keamanan tidak hanya mencakup aspek militer dan negara, tetapi juga melibatkan aktivitas dari aktor non-negara. Barry Buzan membagi sektor keamanan ke dalam lima kategori: militer, politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sektor militer adalah salah satu aspek penting dari keamanan, tetapi ancaman tidak lagi bersifat murni militer.

Sistem pertahanan dan keamanan harus dikelola dengan baik untuk melindungi negara dari ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri, menekankan pentingnya mempertimbangkan ideologi nasional serta sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya.⁴¹ Lembaga-lembaga fungsional, seperti aparatur negara, organisasi masyarakat, serta partai politik, sangat diperlukan. Selain itu, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil juga berperan penting.

Dinamika masalah keamanan mengubah konsep keamanan nasional dari yang berfokus pada negara menjadi yang berfokus pada masyarakat. Hal ini menjadikan keamanan bersifat komprehensif dan memerlukan kerja sama antara berbagai aktor dan lembaga. Dalam konteks ini, keamanan nasional dipahami sebagai kebutuhan mendasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa, menggunakan kekuatan politik, militer, dan ekonomi untuk

⁴¹ Sidratahta Mukhtar "KEAMANAN NASIONAL: ANTARA TEORI DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA " hlm 127

menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri⁴². Pandangan ini mendukung argumen bahwa dalam negara demokrasi, keamanan nasional mencakup keamanan negara, masyarakat, dan manusia.

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban dari seseorang yang melakukan suatu tindakan untuk menanggung segala konsekuensi akibat dari perbuatannya. Dalam teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum seseorang relatif atas tindakan tertentu berarti bahwa orang tersebut harus menanggung sanksinya setiap kali tindakan itu dengan salah melanggar hukum. Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu:⁴³

a. Liability

Liability adalah istilah hukum yang luas dan mencakup hampir semua jenis risiko dan tanggung jawab, baik yang pasti maupun yang potensial. Ini melibatkan berbagai hak dan kewajiban yang dapat terjadi, seperti kerugian, ancaman, tindakan kriminal, biaya, atau kondisi yang menciptakan kewajiban untuk mematuhi hukum. Liability juga dapat berarti tanggung jawab untuk menanggung kerugian yang timbul akibat perbuatan sendiri atau orang lain. Dengan kata lain, *liability* adalah kewajiban untuk membayar kompensasi atas kerugian yang dialami.

b. Responsibility

⁴² Sidratahta Mukhtar "KEAMANAN NASIONAL: ANTARA TEORI DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA " hlm 128

⁴³ Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

Responsibility adalah suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kewajiban, mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan, serta kecakapan, termasuk kewajiban mematuhi hukum yang berlaku. Tanggung jawab dalam konteks *responsibility* berarti seseorang harus menanggung segala konsekuensi yang dituduhkan, menanggung beban dari tindakan sendiri maupun orang lain, dan dapat menghadapi sanksi hukum di pengadilan. Sementara itu, istilah *liability* merujuk pada tanggung jawab hukum, yaitu kewajiban untuk mengganti kerugian akibat kesalahan subyek hukum. Di sisi lain, *responsibility* lebih mengarah pada pertanggungjawaban politik.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁴⁴ Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya berupa studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan,

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 47-48.

perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis segala peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait terhadap isu hukum yang akan diteliti, yaitu pendekatan dengan menelaah sumber hukum sebagai berikut:

1. Konvensi Den Haag 1899
2. Konvensi Den Haag 1907
3. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan I, II dan III
4. Hukum Humaniter Internasional

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang telah berkembang dari ilmu hukum.⁴⁵ Pandangan dan doktrin inilah yang kemudian akan mempertegas dan memperjelas ide-ide melalui beberapa konsep dan pengertian tentang hukum serta melalui asas yang dianggap relevan dan sesuai dengan permasalahan.

c. Pendekatan Analisis (Analytical Approach)

Pendekatan analisis terhadap bahan hukum yaitu untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Search)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 28.

dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan ini yang merupakan seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi kebahasaan yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Sumber Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer disebut dengan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain bersumber dari:

1. Konvensi Den Haag 1899
2. Konvensi Den Haag 1907
3. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan I, II dan III
4. Universal Declaration of Human Rights
5. The Covenant on Civil & Political Rights

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli berupa buku-buku, pendapat-pendapat pakar hukum, rancangan dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan penelitian tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Artinya yakni bahan-bahan hukum yang menguraikan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan juga ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi pustaka dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Adapun cara yang dilakukan ialah dengan menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang akan dibahas.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deduktif, artinya cara berpikir mendasar terhadap hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai

dengan pokok permasalahan tersebut bersifat umum dan kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum ini merupakan bagian dari penulis hukum berupa penyusunan proposal skripsi akan dibagi menjadi 4 (empat) bagian utama dengan uraian sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori dan Metode Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tentang tinjauan mengenai tinjauan umum hukum humaniter, pengertian hukum humaniter, tinjauan mengenai asas hukum humaniter, tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban hukum internasional.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai status hukum Wagner Group sebagai PMC dalam pemberian jasa keamanan berdasarkan konteks Hukum Humaniter Internasional, tanggung jawab dan akuntabilitas hukum dapat diterapkan kepada Wagner Group atas tindakan yang diduga melanggar Hukum Humaniter Internasional selama melakukan operasi militer di Republik Afrika Tengah, dan hal dapat dilakukan oleh pemerintah negara Republik Afrika Tengah dalam mengatasi tindakan dan pengaruh dari Wagner Group.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab yang sebelumnya dan dapat ditarik kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Annisa. *Teori Kedaulatan: Pengertian dan Jenisnya*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.
- Arief, Alexis, Christopher M. Blanchard, Lauren Ploch Blanchard, dan Andrew S. Bowen. *Russia's Wagner Group in Africa: Issues for Congress*. 2023.
- Baev, Anton dan Mikhail Maglov. *Contract from President: What the Company Linked to Prigozhin Won in the CAR*. The Bell, 2018.
- Banco, Erin. *U.S. Cable: Russian Paramilitary Group Set to Get Cash Infusion from Expanded African Mine*. Politico, 2023.
- Beale, Jonathan. *Russia-supporting Wagner Group Mercenary Numbers Soar*. BBC News, 2024.
- Blazakis, Jason, Colin P. Clarke, Naureen Chowdhury Fink, dan Sean Steinberg. *Special Report Wagner Group: The Evolution of a Private Army*. 2023.
- Calvet, Sébastien. *RCA: Les Diamants de Sang de Prigojine*. 2022.
- Center for Preventive Action. *Conflict in the Central African Republic*. Global Conflict Tracker, 2025.
- Chief Bisong Etahoben. *CAR: Russian Mercenaries Assert Authority Over Bria, Say UN Forces Not In Charge*. HumAngle, 2021.
- Congressional Research Service. *Russia's Wagner Private Military Company (PMC)*. 2023.
- Ioanes, Ellen. *These Are the Countries Where Russia's Shadowy Wagner Group Mercenaries Operate*. Business Insider, 2018.
- Kharief, Akram. *Foreign Mercenaries in New Scramble for Africa and the Sahel*. Middle East Eye, 2024.
- Kurnia, Mahendra Putra. *Hukum Internasional (Kajian Ontologis)*. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2008.
- Larsen, Karen Philippa dan Flemming Splidsboel Hansen. *Russia's Comprehensive*

Approach and the Increased Use of the Wagner Group Challenges the West in Africa. 2022.

Luhn, Alec. *Russian Journalists Killed in Central African Republic While*

Investigating Mercenaries of 'Putin's Chef'. 2018.

Maulana, Yati. *Jaringan Operasi Tentara Bayaran Wagner, dari Eropa Hingga Afrika*.

Katakini, 2025.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Legal Search)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

McGregor, Andrew. *How Russia Is Displacing the French in the Struggle for Influence in the Central African Republic*. Jamestown, 2018.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mukhtar, Sidratahta. *Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia*. 2011.

Nemtsova, Anna. *A Russian Blackwater? Putin's Secret Soldiers in Ukraine and Syria*. The Daily Beast, 2024.

Neethling, Theo. *Russian Para-Military Operations in Africa: The Wagner Group as a De Facto Foreign Policy Instrument*. 2023.

Obaji Jr, Philip. *Wagner Group Accused of Killing 70 Civilians in Gold Mine Massacre*. 2022.

Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Russian News Agency. *Russia Provides Free Military Aid to Central African Republic — Foreign Ministry*. TASS, 2018.

Scahill, Jeremy. *The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army*. Terjemahan Aang Muljanto dan Winny Prasetyowati. 2010.

Schreck, Carl. *What Are Russian Military Contractors Doing In The Central African Republic?* Radio Free Europe / Radio Liberty, 2018.

The Sentry. *Architects of Terror*. 2023.

United States Department of State. *Country Reports on Human Rights Practices for 2023*. 2023.

Zygner, David dan Neue Zürcher Zeitung. *How Russia Is Influencing Crisis-Stricken African Countries*. 2018.